

GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA WR**KABUPATEN SIDOARJO****DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE OF THE VILLAGE HEAD OF WR
SIDOARJO REGENCY****Helmi Rizqi Romadhon**

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: prasetyoisbandono@unesa.ac.id (10pt)

Abstrak

Kepemimpinan kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Salah satu gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks pemerintahan desa adalah kepemimpinan demokratis, yang menekankan keterlibatan bawahan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa WR Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan utama Kepala Desa dan perangkat desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa WR tercermin dalam dua aspek utama, yaitu perilaku pemimpin demokratis dalam memimpin dan perilaku pemimpin demokratis dalam menghadapi bawahan. Kepala desa menerapkan komunikasi dua arah, memberikan ruang bagi bawahan untuk menyampaikan pendapat, serta tidak bersifat mengintimidasi dalam melakukan pengawasan. Namun, masih ditemukan kendala berupa belum meratanya profesionalisme bawahan akibat kedekatan personal dan kurang optimalnya transparansi publikasi kegiatan desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan demokratis di pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kepemimpinan Demokratis, Kepala Desa, Pemerintahan Desa**Abstract**

Village leadership plays a strategic role in the implementation of village governance, particularly in creating participatory, transparent, and accountable administration. One leadership style that is considered relevant in the context of village government is democratic leadership, which emphasizes the involvement of subordinates and the community in decision-making processes. This study aims to describe the democratic leadership style of the Head of WR Village, Waru District, Sidoarjo Regency. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with the village head and village officials as key informants. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the democratic leadership style of the Head of WR Village is reflected in two main aspects: democratic leadership behavior in leading and democratic leadership behavior in dealing with subordinates. The village head applies two-way communication, provides opportunities for subordinates to express opinions, and avoids intimidating supervision practices. However, several challenges remain, including uneven professionalism among subordinates due to personal closeness and the lack of optimal transparency in publicizing village activities. This study is expected to serve as an evaluation and provide recommendations for improving the quality of democratic leadership in village governance.

Keywords: Democratic Leadership, Village Head, Village Governance

Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, dan aktivitas ekonomi. Sampah tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis pengangkutan dan pembuangan, tetapi telah berkembang menjadi isu multidimensional yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan (Putri et al., 2023). Ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah konvensional dalam menyesuaikan diri dengan laju timbulan sampah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup. Secara global, pendekatan pengelolaan sampah telah bergeser dari paradigma *end of pipe* menuju paradigma pengelolaan berkelanjutan berbasis *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Pergeseran paradigma ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan sampah dari sumbernya (UNEP, 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas manajemen kelembagaan di tingkat lokal (Kojo et al., 2022).

Di Indonesia, permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi isu strategis nasional. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional terus meningkat setiap tahunnya, sementara tingkat pengelolaan sampah yang memadai masih relatif rendah (KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan pemerintah dengan implementasinya di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan lingkungan nasional. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkembang di Indonesia adalah program bank sampah. Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah yang mengadopsi prinsip perbankan, di mana sampah yang telah dipilah dapat ditabung dan memiliki nilai ekonomi (Wicaksono & Warsono, 2020). Melalui mekanisme ini, bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan sampah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Meskipun bank sampah telah diakui sebagai inovasi sosial yang strategis, keberlanjutan program bank sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak bank sampah yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang akibat lemahnya manajemen organisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketergantungan pada pendampingan pihak eksternal (Saputra et al., 2022; Pakaya et al.,

2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan bank sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan potensi lokal. Dalam konteks tersebut, kepala desa menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga kemampuan memengaruhi, menggerakkan, dan membangun kerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat. Northouse (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan ini menegaskan bahwa kepemimpinan menekankan aspek hubungan interpersonal dan pengaruh sosial, bukan semata-mata kekuasaan formal. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

Salah satu gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks pemerintahan desa adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menekankan partisipasi aktif bawahan dalam pengambilan keputusan, komunikasi dua arah, keterbukaan, serta penghargaan terhadap pendapat dan potensi individu (Kartono, 1986; Robbins & Judge, 2019). Dalam lingkungan desa yang memiliki ikatan sosial kuat, pendekatan demokratis dinilai mampu membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pemimpin dan bawahan.

Namun, implementasi kepemimpinan demokratis dalam pemerintahan desa tidak selalu berjalan optimal. Permasalahan seperti pergantian kepala desa, kedekatan personal yang memengaruhi profesionalisme kerja, serta kurangnya transparansi publikasi kegiatan desa masih sering ditemukan. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa WR Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa WR dalam menjalankan pemerintahan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa WR Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian

mengacu pada teori kepemimpinan demokratis Suradji dan Martono yang meliputi perilaku pemimpin dalam memimpin dan dalam menghadapi bawahan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Informan penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, dan staf desa. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa WR telah menerapkan prinsip kepemimpinan demokratis dalam memimpin pemerintahan desa. Hal ini tercermin dari adanya komunikasi dua arah antara kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa membuka ruang diskusi dan musyawarah dalam berbagai forum kerja, sehingga bawahan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan saran. Praktik ini sejalan dengan pendapat Suradji dan Martono (2014) yang menyatakan bahwa komunikasi dua arah merupakan indikator utama kepemimpinan demokratis.

Selain komunikasi, pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa cenderung tidak bersifat mengintimidasi. Kepala desa lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan dengan pemberian sanksi secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dimaknai sebagai kontrol ketat, melainkan sebagai upaya memastikan pekerjaan berjalan sesuai tujuan bersama. Robbins dan Judge (2019) menegaskan bahwa pemimpin demokratis mendorong kepatuhan melalui kesadaran, bukan melalui tekanan atau rasa takut.

Dalam aspek keterbukaan, kepala desa bersikap relatif terbuka terhadap saran, pendapat, dan pertimbangan dari bawahan. Perangkat desa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, meskipun keputusan akhir tetap berada pada kepala desa. Hal ini sesuai dengan konsep kepemimpinan demokratis yang memberikan ruang partisipasi tanpa menghilangkan tanggung jawab pemimpin (Terry, 1972). Keterlibatan bawahan ini turut meningkatkan rasa memiliki terhadap program kerja desa.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam penerapan kepemimpinan demokratis, khususnya terkait profesionalisme kerja bawahan. Kedekatan personal antara kepala desa dan beberapa perangkat desa terkadang memengaruhi disiplin dan etika kerja formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan yang terlalu dominan dapat menurunkan standar profesional jika tidak diimbangi dengan aturan kerja yang jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmawati (2021) yang menekankan pentingnya batasan profesional dalam hubungan kerja. Dalam menghadapi bawahan, kepala desa lebih mengutamakan kesadaran dalam menjalankan tugas dibandingkan dengan instruksi yang bersifat memerintah. Kepatuhan bawahan umumnya muncul karena adanya rasa tanggung jawab, bukan karena tekanan. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik kepemimpinan demokratis yang menghargai cipta, rasa, karsa, dan karya bawahan (Kartono, 1986). Meskipun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada tingkat kedewasaan dan pemahaman etika kerja masing-masing bawahan.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa aspek transparansi pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam publikasi kegiatan desa kepada masyarakat. Kurangnya pemanfaatan media informasi desa menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum

sepenuhnya optimal. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penerapan kepemimpinan demokratis di Desa WR telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek profesionalisme dan transparansi agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Desa WR secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan demokratis, baik dalam memimpin maupun dalam menghadapi bawahan. Kepala desa mampu membangun komunikasi yang terbuka, menciptakan suasana kerja yang partisipatif, serta menumbuhkan kesadaran bawahan dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam menjaga profesionalisme kerja perangkat desa dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan norma kerja, etika profesional, serta optimalisasi publikasi kegiatan desa guna mendukung terwujudnya kepemimpinan demokratis yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Badu, R. G. (2022). *Gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kumpi Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara* (Abd. K. H. Pandipa & H. Lagantondo, Eds.) [Thesis].

Fanani, A. F., Iqbal, M. M., Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan transformasional sektor publik. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 84–90.

Ferdinand. (2023). *Gaya kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi gaya kepemimpinan Kepala Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur)*.

Hariati, T. (2018). *Gaya kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (Studi pada Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang)* [Thesis, Universitas Brawijaya]. <http://fia.ub.ac.id>

Lestari, Y., & Prasetyawan, A. (2018). Leadership style of organizational developers and builders in creating democratic leadership. In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* [Conference proceeding].

Lestari, Y., Prastyawan, A., Isbandono, P., & Public Administration of Vocational Program, Universitas Negeri Surabaya. (2021). Women leadership based on local wisdom. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 618, 994.

Lestari, Y., Rosdiana, W., & Noviyanti. (2018). Democracy leadership (study approach of bureaucrats leadership at sub bagian tata usaha badan perencanaan pembangunan daerah, East Java province). *Journal of Physics: Conference Series*, 953, 012165. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012165>

Lestari, Y., Isbandono, P., Gamaputra, G., Prastyawan, A., Rosdiana, W., & Utami, D. A. (2019). Characteristic of women leaders in the millennials perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 383, 265–269.

Mattayang, B. (2019). Tipe dan gaya kepemimpinan: Suatu tinjauan teoritis. *JEMMA*, 2(2), 45–47.

Nahdah, A. (2021). *Gaya kepemimpinan kepala sub bagian umum dan kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya* (Tugas Akhir, Universitas Negeri Surabaya).

Notoatmodjo, S. (2017). *Metode Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.

Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.).

Nugrahani, F. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1(1).

Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 334–335.

Pangestu, D. E., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisis penerapan diklat kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan. *Publika*, 10(3), 777–788.

Rosdiana, W., Lestari, Y., Darwis, M., & Mokat, J. E. H. (2018). Leadership characteristic in the county decentralization era. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 226, 374–377.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Saputra, W., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2021). Kepemimpinan demokratis kepala sekolah di sekolah menengah kejuruan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2905–2910. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.996>.

Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syamsidar, Yustikarini, L., & Universitas PGRI Palembang. (2019). Kepemimpinan demokratis dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 975–977.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia & Presiden Republik Indonesia.

Utari, S. (2020). Gaya kepemimpinan demokratis Perpustakaan Kota Yogyakarta (studi kasus). *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1).

Utomo, P., Kusuma, A. M., Prihanto, J. N., Saputra, N., & Warcito. (2021). *Advanced strategic management in organisation and business: Perspective, approach, and dynamics*. Bintang Pustaka Madani.

Yudiaatmaja, F. (2013). Kepemimpinan: Konsep, teori dan karakternya. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 30.

Yugusna, I., Fathoni, A., & Haryono, A. T. (2016). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis dan lingkungan kerja terhadap kinerja dan kedisiplinan karyawan. *Journal of Management*, 2(2).